



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG



Rencana Kerja

Tahun 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN	KATA PENGANTAR....
DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	54
3.3 Program dan Kegiatan.....	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	74
BAB V PENUTUP	80

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap lembaga/ dinas untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan secara terperinci sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam periode 5 tahun. Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun RPJMD tahun 2018-2022 yang selanjutnya dijabarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang sebagai SKPD dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Singkawang tahun 2018-2022 yang selanjutnya diuraikan secara terperinci kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Singkawang.

Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Renstra Bappeda Kota Singkawang 2018-2022. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang tahun 2022 sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan pada Bappeda Kota Singkawang pada tahun anggaran 2022 menjadi suatu keharusan dan merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Singkawang tahun anggaran 2022.

Selanjutnya diharapkan semua komponen aparatur di Bappeda Kota Singkawang serta semua pihak yang berkepentingan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dapat memanfaatkan Renja Bappeda Kota Singkawang 2022 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan tahun 2022.

Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kota Singkawang.



Singkawang, Juni 2021
Bappeda Kota Singkawang

MUSMITA FITRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196305251993031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD serta diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran dan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan daerah serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Singkawang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan serta melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda Kota Singkawang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kota Singkawang. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Oleh karenanya, Bappeda Kota Singkawang perlu menyusun acuan/ pedoman pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah tahunan yang selanjutnya dituangkan dalam Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2022.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak yaitu sebagai

pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

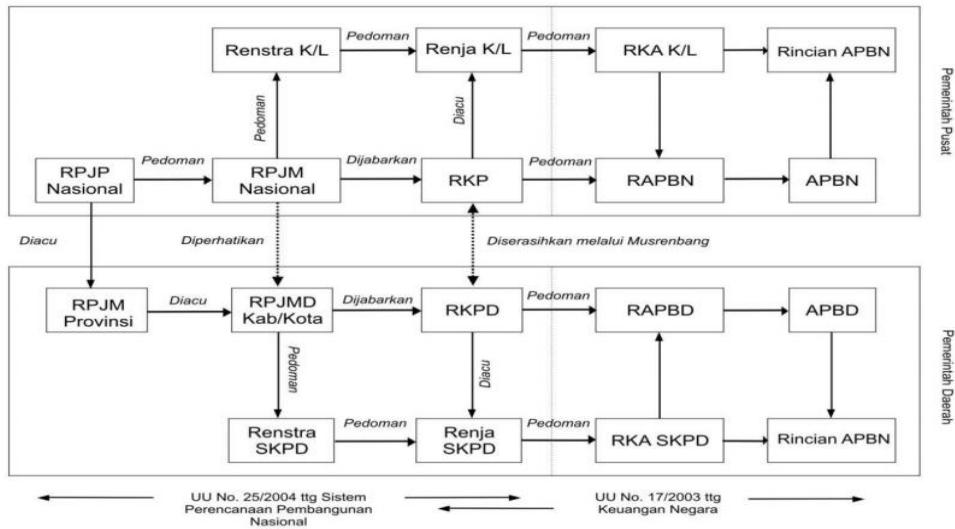
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi.
 - Analisis gambaran pelayanan OPD.
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD.
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - Pembahasan forum OPD; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

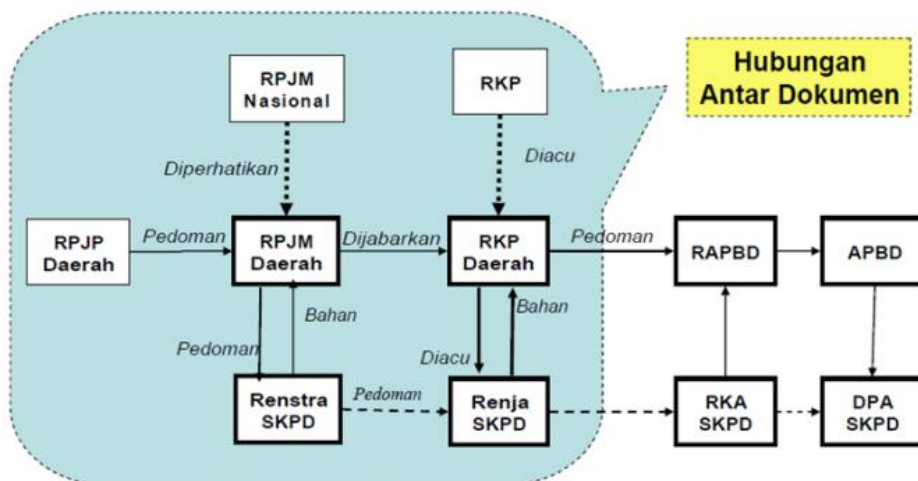
Skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini :



Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Caca Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
 15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
 16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
 18. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang;
 19. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 39);
 20. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 58).
 21. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 26).

22. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 40)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Bappeda Kota Singkawang tahun 2021 ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappeda Kota Singkawang tahun 2022.

Adapun tujuan umum penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2022 adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Singkawang sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Singkawang;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;
6. Acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Singkawang tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - 3.4. Telaahan Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS 2015-2019 dan Renstra BAPPEDA Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018
 - 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V : PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun $n-2 = 2022-2 = 2020$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik Sarana, Prasarana dan tata ruang Wilayah
 - b. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - e. Program Peningkatan Disiplin aparatur
 - f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - g. Program Penguatan Transparansi Publik
 - h. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi
 - i. Program Pengembangan data/Informasi
 - j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - k. Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
 - l. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya
 - m. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

4. Faktor-faktor Penyebab
 - a. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu :

1. Adanya tansisi perubahan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana

tercantum dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2. Adanya refocusing anggaran pada beberapa program kegiatan dan sub kegiatan sehingga pelaksanaan rapat koordinasi menjadi terbatas
3. Kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan intensitas rapat-rapat koordinasi menjadi terbatas dan berkurang
- b. Faktor Penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
 1. Adanya Komitmen bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan program dan kegiatan.
 2. Berusaha Seoptimal mungkin untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan yang direncanakan.
- c. Faktor Penyebab melebihinya target kinerja program/kegiatan

Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang capaiannya melebihi target maka dari itu tidak dapat disimpulkan faktor penyebabnya.
5. Implikasi yang Timbul Terhadap Taget Capaian Renstra Bappeda

Dikarenakan terdapat beberapa program pada tahun akhir 2021 tidak didukung oleh tersedianya anggaran perencanaan yang memadai sehingga target capaian kegiatan tidak mencapai 100% dari yang direncanakan sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapainya target capaian Renstra OPD 2018 - 2022. Dengan tidak tercapainya target capaian Renstra OPD 2018-2022 sesuai yang direncanakan di tahun pertama pelaksanaan mengakibatkan penambahan target pada penyesuaian target capaian pada Renstra 2018 – 2022
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang Perlu Diambil untuk mengatasi Faktor-faktor Penyebab

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2021 dan Renstra 2018 – 2022.
2. Efisiensi alokasi belanja.
3. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target
4. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas program/kegiatan sejenis dengan instansi

terkait, presentasi pada pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan memaksimalkan sumberdaya yang ada.

Pembuatan *roadmap* untuk mencari permasalahan inti serta kebijakan yang *legitimate* atas pelimpahan wewenang perlu segera ditetapkan

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Rentra Bappeda s/d Tahun 2021

INSTANSI : PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
 UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 ALAMAT : JALAN PELITA NO 1 KOTA SINGKAWANG

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERENCANAAN			2019	2020	2020	2020	2021	2021	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	15 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	12 Dok	80
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	12 Dok	80
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	15 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	12 Dok	80
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang disediakan Gaji dan Tunjangannya	93 Orang	62 Orang	31 Orang	31 Orang	100	29 Orang	36 bulan	80
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Jasa Adminitrasi Keuangan Yang Disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	4 Dok	80
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu yang Diadakan	245 Stel	80 Stel	40 Stel	40 Stel	100	45 Stel	165 Stel	67
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor Yang di Sediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang di adakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor Yang disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	15 Surat Kabar	6 Surat Kabar	3 Surat Kabar	3 Surat Kabar	100	3 Surat Kabar	12 Surat Kabar	80
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Yang dilaksanakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Internet dan Listrik yang disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

		Jumlah PTT yang menerima gaji								
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang di pelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan rehabilitasi sarana dan prasarana yang di rehabilitasi	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD								
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD								

5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan Anggaran	8 Dok	0	0	0	0	4 Dok	4 Dok	50
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20 Keg	0	0	0	0	10 Keg	10 Keg	50
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Forum OPD	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	4 Keg	80
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	4 Keg	80
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	25 Dok	10 Dok	5 Dok	5 Dok	100	5 Dok	20 Dok	804
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dok	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	8 Dok	80

5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang dikumpulkan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	2 Keg	0	0	0	0	1 Keg	1 Keg	50
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan OPD yang Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan.								
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	16 Keg	0	0	0	0	8 Keg	8 Keg	50
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Kerjasama	2 Lap	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8 Dok	0	0	0	0	4 Dok	4 Dok	50
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD								
		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang sesuai dengan RPJMD/RKPD								
		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD								
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD								
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	12 Keg	0	0	0	0	6 Keg	6 Keg	50
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Keg	0	0	0	0	5 Keg	5 Keg	50
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	10 Keg	0	0	0	0	5 Keg	5 Keg	50
		Jumlah Rapat Koordinasi TKPK	12 Keg	0	0	0	0	6 Keg	6 Keg	50
5.01.03.2.01.05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12 Keg	0	0	0	0	6 Keg	6 Keg	50
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan OPD Bidang Ekonomi dan SDA yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD								
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	2 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	20 Keg	0	0	0	0	10 Keg	10 Keg	50

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Kali	0	0	0	0	7 Kali	7 Kali	50
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	10 Keg	0	0	0	0	5 Keg	5 Keg	50
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Keg	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD								
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	26 Keg	0	0	0	0	13 Keg	13 Keg	50
5.01.02.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	14 Keg	0	0	0	0	7 Keg	7 Keg	50

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

		Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.02.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	14 Keg	0	0	0	0	7 Keg	7 Keg	50
5.01.02.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	8 Keg	0	0	0	0	4 Keg	4 Keg	50
		Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen atau Laporan Hasil Kegiatan yang difasilitasi	2 Lap	0	0	0	0	1 Lap	1 Lap	50
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	6 Dok	0	0	0	0	3 Dok	3 Dok	50
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian Penataan Ruang dan Pertanahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen/Kajian Bidang Komunikasi dan Informatika	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Komunikasi								
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kajian di Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun	2 Dok	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	50
		Jumlah Pemenang Lomba Inovasi Daerah	6 Pemenang	0	0	0	0	3 Pemenang	3 Pemenang	50
5.05.02.2.02.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan dan/atau didiseminasikan	11 Hasil Kelitbangan	0	0	0	0	5 Hasil Kajian Kelitbangan	5 Hasil Kajian Kelitbangan	45

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan *bottom-up* dan *top down*, yang dikenal dengan istilah *shopping list key working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kota Singkawang yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sasaran Strategis.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan
3. Meningkatnya Capaian Target Pembangunan

Sedangkan Indikator Kinerja Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kesesuaian Program dengan Dokumen Perencanaan
2. Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan
3. Persentase Capaian Target Pembangunan

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diatas, akan kami uraikan dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan tersebut dibawah ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase Kesesuaian Program dengan Dokumen Perencanaan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2.	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan	-	-	5%	50%	15%	15%	15%	100%		100%	100%	
3.	Persentase Capaian Target Pembangunan	-	-	60%	70%	80%	90%	100%	100%		100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan cukup baik. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai Persentase Kesesuaian Program dengan Dokumen Perencanaan, Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan, dan Persentase capaian target pembangunan. Pencapaian indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Program dengan Dokumen Perencanaan	%	100
2	Meningkatnya Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan	%	15
3	Meningkatnya Capaian Target Pembangunan	Persentase Capaian Target Pembangunan	%	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria tinggi, dengan rata-rata target capaian 100 %

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Belum optimalnya kinerja SDM yang ada.
2. Belum optimalnya manajemen SDM berbasis teknologi informasi.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Kurang efisiennya pengelolaan kegiatan dan anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja kelembagaan.
5. Belum optimalnya koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar Perangkat Daerah.
6. Belum optimalnya integrasi dan validitas data perencanaan pembangunan.
7. Adanya wabah Covid-19 membuat rapat-rapat koordinasi menjadi terhambat
8. Adanya refocusing anggaran yang membuat beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya pagu dana.
9. Adanya beberapa sub kegiatan yang belum terakomodir didalam dokumen perencanaan

2.3.3 Dampaknya terhadap visi dan misi kepala daerah, terhadap program nasional seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

- a. Peluang daerah untuk menarik investor untuk bersedia menanamkan modalnya di daerah sangat terbuka.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menunjang prioritas dan sasaran daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan telah menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai alat penyusunan RKPD/RKPD Perubahan yang mudah, cepat, tepat dan telah sesuai dengan arahan yang ada pada Permendagri No. 70 Tahun 2019. Sistem ini mampu menyajikan analisa yang informatif bagi para pemangku kepentingan.
- c. Dampak terhadap program nasional, Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis IT ini diharapkan mampu

menaikkan apresiasi publik dan penilaian pelayanan publik baik dari Ombudsman Republik Indonesia, BPKP, maupun instansi lainnya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

➤ Tantangan yang dihadapi :

- a. Mewujudkan penyusunan prioritas pembangunan dengan prinsip money follow program;
- b. Perumusan kebijakan berbasis riset;
- c. Mewujudkan sinergisitas perencanaan sektoral dan kewilayahan;
- d. Pemenuhan persyaratan teknis untuk pengajuan usulan program dan kegiatan ke Pemerintah Kalimantan Barat dan Pemerintah pusat;
- e. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal pemerintah daerah maupun dengan Pemerintah Kalimantan Barat dan pemerintah pusat;
- f. Mewujudkan sinergisitas kebijakan dan tatakala perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Kalimantan Barat dan Pemerintah pusat;
- g. Mensinergikan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah

➤ Peluang :

- a. Adanya regulasi yang memberikan kejelasan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan dari tahap perencanaan sampai penganggaran
- b. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan
- c. Kebijakan dari pemerintah pusat mengenai money follow program memberikan pedoman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana menentukan program prioritas beserta pagu anggarannya
- d. Dengan penentuan program prioritas yang lebih focus dan sinkron dengan prioritas nasional dan provinsi, akan memberikan kesempatan untuk meraih anggaran dari APBD Kalimantan Barat dan APBN Adanya anggaran keistimewaan

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

- a. Optimalisasi manajemen kinerja dan kualitas SDM yang memiliki komitmen, kompeten, handal dan responsif;
- b. Optimalisasi penatausahaan dan kearsipan dokumen-dokumen perencanaan;
- c. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan serta konsultasi pada berbagai aspek yang terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah atau stakeholder terkait lainnya;
- d. Optimalisasi kualitas manajemen dan sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif,
- e. Optimalisasi penyelenggaraan program dan pembiayaan pembangunan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Pemerintah Kota Singkawang dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Singkawang terdapat perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Perbandingan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara rancangan awal RKPD dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang yang selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan dan penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dalam mendukung

pencapaian tujuan RKPD tahun 2022. Dimana Terkait masing masing OPD telah mendapatkan pagu maka ada program kegiatan yang berubah nilainya dan ada kegiatan yang tidak bisa dimasukkan dalam rencana kerja namun ada beberapa program baru yang diusulkan prioritas.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang merencanakan untuk melaksanakan 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) kegiatan dan sub kegiatan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 11.450.696.591,00

Pagu Indikatif Bappeda mengalami peningkatan sebesar Rp 5.346.964.460,00 yang pada tahun 2021 sebelumnya mengalami refocusing anggaran menjadi Rp. 6.103.732.131,00. Peningkatan pagu indikatif ini dilakukan dengan pertimbangan laju inflasi di tahun 2022 dan untuk pembangunan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang. Rasionalisasi anggaran dilakukan dengan tanpa merubah output kegiatan maupun target kinerja output kegiatan.

Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Bappeda Kota Singkawang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
	PERENCANAAN										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.720.696.591	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.730.246.591	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	46.350.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	55.900.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Daerah	3 Dokumen	15.450.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Daerah	3 Dokumen	15.450.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dokumen	15.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dokumen	15.450.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Renja, RFK, PMPRB)	3 Dokumen	15.450.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Renja, RFK, PMPRB)	4 Dokumen	25.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	3.334.934.091	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	3.334.934.091	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangan	31 Orang	3.019.484.091	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangan	31 Orang	3.019.484.091	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%	300.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%	300.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	15.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	15.450.000	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelayanan admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelayanan admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	40.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	40 Stel	40.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	40 Stel	40.000.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.014.239.740	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.014.239.740	
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	9.500.000	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	9.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	100% 100% 100%	285.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	100% 100% 100%	285.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	100%	8.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	100%	8.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Cakupan Bahan Logistik Kantor	100%	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Cakupan Bahan Logistik Kantor	100%	15.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	39.739.740	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	39.739.740	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Surat Kabar	6.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Surat Kabar	6.500.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100%	650.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100%	650.000.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.550.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.550.000.000	
	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan		Cakupan Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	1 unit	550.000.000	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan		Cakupan Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	1 unit	550.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pembangunan Gedung Kantor Bappeda	1 Buah	3.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pembangunan Gedung Kantor Bappeda	1 Buah	3.000.000.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	534.512.760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	534.512.760	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah PTT yang menerima gaji	100%	282.512.760	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah PTT yang menerima gaji	100%	282.512.760	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	200.660.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	200.660.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	1 Unit	35.040.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	1 Unit	35.040.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	1 Unit	105.120.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	1 Unit	105.120.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara Cakupan Rumah Dinas yang dipelihara	100 m ²	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara Cakupan Rumah Dinas yang dipelihara	100 m ²	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	53 Unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	53 Unit	45.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100 m ²	5.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100 m ²	5.500.000	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	1.343.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	1.343.000.000	
8.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	558.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	558.000.000	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen kebijakan Anggaran	4 Dokumen	27.150.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen kebijakan Anggaran	4 Dokumen	27.150.000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	10 Kegiatan	44.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	10 Kegiatan	44.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Kegiatan Forum OPD	1 Kegiatan	40.200.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Kegiatan Forum OPD	1 Kegiatan	40.200.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Musrenbang RKP	1 Kegiatan	191.150.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Musrenbang RKP	1 Kegiatan	191.150.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Dokumen Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5 Dokumen	39.500.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Dokumen Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5 Dokumen	39.500.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	216.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	216.000.000	
9.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	500.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	500.000.000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang dikumpulkan	100%	200.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang dikumpulkan	100%	200.000.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	150.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	150.000.000	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
10.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan OPD yang Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan.	100%	285.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan OPD yang Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan.	100%	285.000.000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6 Kegiatan	50.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	6 Kegiatan	50.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan Pengendalian Kerjasama	1 Laporan	25.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Laporan Pengendalian Kerjasama	1 Laporan	25.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	210.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	210.000.000	

	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD			
			Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	795.000.000			Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	795.000.000	
			Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD					Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD			
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Cakupan OPD Bidang Pemerintahan dan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	335.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Cakupan OPD Bidang Pemerintahan dan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	335.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10 Kegiatan	70.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan		Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	10 Kegiatan	70.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, Jumlah Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Dokumen 10 Kegiatan	40.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, Jumlah Rapat Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Dokumen 10 Kegiatan	40.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Kegiatan	195.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Kegiatan	195.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia, Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen 5Kegiatan	30.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia, Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen 5Kegiatan	30.000.000	
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Cakupan OPD Bidang Pembangunan Manusia yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	170.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Cakupan OPD Bidang Pembangunan Manusia yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	170.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	15 Kegiatan	75.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	15 Kegiatan	75.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia, Jumlah rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	2 Dokumen 12 Kegiatan	40.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia, Jumlah rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	2 Dokumen 12 Kegiatan	40.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	10 Kegiatan	35.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	10 Kegiatan	35.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA, Jumlah rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	2 Dokumen 6 Kegiatan	20.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA, Jumlah rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	2 Dokumen 6 Kegiatan	20.000.000	
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dokumen Perencanaanya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	290.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dokumen Perencanaanya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	290.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	20 Kegiatan	200.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	20 Kegiatan	200.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, Jumlah rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	2 Dokumen 10 Kegiatan	40.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, Jumlah rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	2 Dokumen 10 Kegiatan	40.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	10 Kegiatan	30.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	10 Kegiatan	30.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembanguna daerah bidang kewilayahan, Jumlah rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 Dokumen 8 Kegiatan	20.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembanguna daerah bidang kewilayahan, Jumlah rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 Dokumen 8 Kegiatan	20.000.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	592.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	793.490.124	
14.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		Adanya peningkatan capaian kinerja pada Bidang Sosial Budaya	100%	127.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		Adanya peningkatan capaian kinerja pada Bidang Sosial Budaya	100%	127.000.000	
	Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Tersedianya dokumen/laporan hasil kegiatan yang di fasilitasi	1 Laporan	12.000.000	Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Tersedianya dokumen/laporan hasil kegiatan yang di fasilitasi	1 Laporan	12.000.000	
	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan		Tersedianya dokumen data Kelitbangan dan peraturan	1 Dokumen	115.000.000	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan		Tersedianya dokumen data Kelitbangan dan peraturan	1 Dokumen	115.000.000	
15.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Adanya peningkatan capaian kinerja pada Bidang Sosial Budaya	100%	115.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Adanya peningkatan capaian kinerja pada Bidang Sosial Budaya	100%	230.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Tersedianya Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	115.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Tersedianya dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	115.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Tersedianya Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	115.000.000	
16.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	95.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	176.490.124	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Dokumen Kajian Penelitian Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	95.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	81.490.124	
						Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Dokumen Kajian Penelitian Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	100.000.000	
17.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	225.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	255.000.000	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah inovasi daerah yang diteliti dan/atau dikembangkan dan/atau direkraskan	3 Inovasi	200.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah inovasi daerah yang diteliti dan/atau dikembangkan dan/atau direkraskan	3 Inovasi	200.000.000	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan dan/atau didiseminasikan	6 Hasil Kelitbangan	55.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan dan/atau didiseminasikan	5 Hasil Kelitbangan	55.000.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian kami padukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kota dan Forum RKPD Kota. Dengan mempertimbangkan skala prioritas, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Usulan Program dan kegiatan pembangunan tahun 2021 dari para pemangku kepentingan di bidang perencanaan, dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021
Dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Singkawang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/Volume	Catatan
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakn dan prioritas nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema prioritas pembangunan nasional adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”.

Sedangkan 9 agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun Rancangan Prioritas Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I.Perekonomian Daerah

1. Peningkatan usaha agribisnis terpadu untuk menunjang pengembangan agroindustri;
2. Peningkatan produksi pangan;
3. Peningkatan kemampuan permodalan dan pemasaran produk UMKM;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah;
5. Pengembangan stabilitas harga;
6. Pengembangan ekonomi kreatif;
7. Peningkatan ekonomi kerakyatan;
8. Pengembangan perdagangan jasa dan pariwisata;

II.Pembangunan Pendidikan

1. Pendidikan vokasi;
2. Peningkatan kualitas guru;
3. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah);
4. Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar;
5. Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
6. Pengembangan budaya baca;
7. Pengembangan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;

III.Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana

1. Peningkatan gizi kesehatan ibu dan anak;
2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit;
3. Promosi kesehatan (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (meliputi sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan);
5. Pemantapan dan pengembangan program KIE;

IV.Pembangunan Ketenagakerjaan

1. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja;
2. Perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan;

V.Pembangunan Kesejahteraan Sosial

1. Pemberdayaan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya;

VI.Sarana dan Prasarana Transportasi

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara dan inter-moda);
2. Percepatan pembangunan bandar udara Singkawang;

VII.Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

1. Pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya air;

VIII.Pembangunan Telekomunikasi dan Informatika

1. Pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika;

IX.Perumahan dan Permukiman

1. Penyediaan perumahan layak;
1. Pemenuhan kebutuhan air bersih (perpipaan, non perpipaan, PAH);
2. Peningkatan kualitas sanitasi perkotaan;
3. Perbaikan dan pengendalian kawasan kumuh;

X.Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

XI.Hukum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Pelaksanaan dan penegakan perda yang sudah ditetapkan;

XII.Pemerintahan

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;

XIII.Wilayah dan Tata Ruang

1. Pengendalian pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang yang ada;
2. Pembangunan sistem pengelolaan pertanahan;
3. Pencegahan dan penanggulangan bencana;

XIV.Agama

1. Peningkatan kerukunan umat beragama;
2. Pengembangan prasarana dan sarana peribadatan;

XV.Budaya

1. Optimalisasi kekayaan budaya.

3.1.1 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

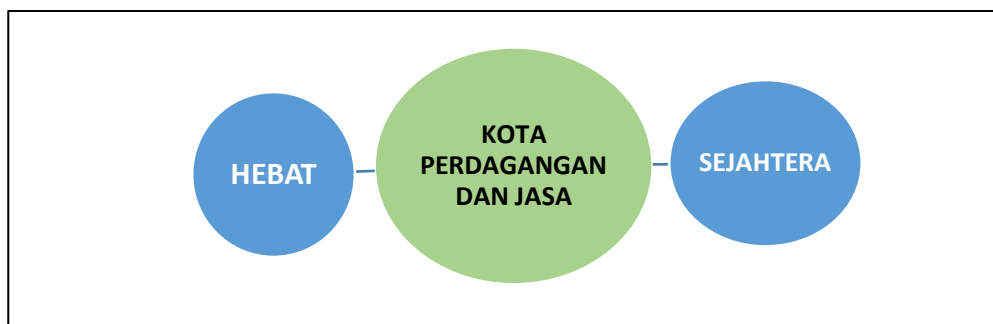
Visi Walikota Singkawang dan Wakil Walikota Singkawang Periode Tahun 2018 - 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah :

“Singkawang HEBAT 2022”

Kata “**HEBAT**” yang tertera didalam Visi tersebut memiliki makna sebagai kata kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya; **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri; **B**ersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan; **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan; **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Visi tersebut memiliki elemen utama pembangunan untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan dan jasa yaitu **hebat** dan **sejahtera**.



Visi tersebut mengandung maksud bahwa Singkawang sebagai kota yang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam pedagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang

kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hebat mengandung arti bahwa masyarakat Kota Singkawang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kota Singkawang menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya.

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang **harmonis** dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

c. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **bersih** adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

- d. Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan. Terciptanya kondisi yang **adil**, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

- e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata.

Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitik beratkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota.

Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah di sekitarnya (*hinterland*). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata.

Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat, Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang.

Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya
- 2) Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;
- 3) Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat ;
- 4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi;
- 5) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat Dan Cerdas;
- 6) Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah Dan Berkesinambungan;
- 7) Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata.

Dari Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, Bappeda merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, maka dalam merumuskan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan diarahkan pada terwujudnya Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2018-2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Misi ke empat yaitu Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi, tujuannya : Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta sasaran : Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan.

3.1.2 TELAHAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022

Telaah terhadap RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, adalah sebagai berikut

:

- 1) Pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kota Singkawang yang terdiri dari 15 tujuan, 25 sasaran dan 45 indikator kinerja sasaran yang terukur setiap tahunnya dalam kerangka pencapaian visi dan misi.

- 2) Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 pada RPJMD telah dirumuskan arah pembangunan Kota Singkawang dan rumusan program pembangunan sebanyak 93 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Penjabaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari uraian tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang memiliki tugas yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Singkawang. Peran strategis Bappeda untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kota Singkawang terutama dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus mempedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

3.1.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015—2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015—2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu “Menjadikan Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergi, dan Kredibel”.

Adapun Rumusan Visi tersebut disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sector pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut: 1) Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan

nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L; 2) Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1 Rumusan 2.2 Rumusan Misi 27 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.1.4 TELAAHAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013-2018

VISI

Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, sehat, cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera

MISI

1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikanserta pemerataan pendidikan.
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembanguana secara berkelanjutan untuk menengurangi kesenjangan antara wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
4. Mengembangkan sumber lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta sumberdaya manusia yang memadai.
6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatut pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang propisional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karis kepegawaian yang berlaku.
7. Menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, mengah dan koperasi, dengan membuka akses kesumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai serta tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan kebudayaan.

9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah perdalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai unsur potensi ekonomi.
10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Tugas dan Fungsi Bappeda

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Tujuan pembangunan daerah disusun berdasarkan rumusan misi sebagai bentuk pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan misi dan menjawab isu strategis Daerah.

3.1.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT RW. Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- 1) Kawasan Pemerintahan, Perdagangan, dan Jasa;
- 2) Kawasan Permukiman;
- 3) Kawasan Pendidikan;
- 4) Kawasan Industri;
- 5) Kawasan Olahraga;
- 6) Kawasan Wisata/Rekreasi;
- 7) Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- 8) Kawasan Pemakaman Umum;
- 9) Kawasan Khusus;

- 10) Kawasan Cagar Budaya;
- 11) Kawasan Pertanian;
- 12) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara;
- 13) Kawasan Budi Daya Sumber Daya Alam;
- 14) Kawasan Strategis;
- 15) Kawasan Hutan Lindung;
- 16) Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 17) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah terhadap implikasi RT RW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RT RW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
- 1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- 2) Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Singkawang yang terus dilakukan. Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :
 - 1) Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RT RW;
 - 2) Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - 3) Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
 - 4) Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022.

Adapun tujuan umum penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2022 adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Singkawang sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Singkawang;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;
6. Acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Singkawang tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Berdasarkan visi dan misi Walikota, maka prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran daerah yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

2. Kebijakan Anggaran

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka pada tahun anggaran 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan 4 (Empat) program, 17 (Tujuh belas) kegiatan, dan 54 (Lima Puluh Empat) Sub Kegiatan. Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada tahun anggaran berkenaan.

3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Program/kegiatan dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 mengacu pada RKPD 2022. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain adalah : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian prioritas dan sasaran daerah, pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama), pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat serta Pemerintah Kota Singkawang.

Anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan. kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

2022 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022.

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan Program Prioritas Tahun 2022

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.343.000.000	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	558.000.000	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	27.150.000	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	44.000.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	40.200.000	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	191.150.000	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	39.500.000	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	216.000.000	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	500.000.000	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	150.000.000	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	285.000.000	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	50.000.000	
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	25.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	210.000.000	
2.		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	795.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	335.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	195.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	30.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	170.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	40.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	290.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2022

3.		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	793.490.124	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	127.000.000	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	12.000.000	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	115.000.000	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	230.000.000	
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	115.000.000	
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	115.000.000	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	181.490.124	
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	81.490.124	
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	100.000.000	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	255.000.000	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	200.000.000	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	55.000.000	

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Pembangunan				11.661.736.715				8.922.910.386
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Singkawang	100%	8.730.246.591	DAU		100%	5.698.271.250
5.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	55.900.000	DAU		100%	61.490.000

2022

5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	3 Dokumen	15.450.000	DAU		3 Dokumen	16.995.000
5.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kota Singkawang	3 Dokumen	15.450.000			3 Dokumen	16.995.000
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra, Renja, RFK, PMPRB)	Kota Singkawang	4 Dokumen	25.000.000	DAU		4 Dokumen	27.500.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	3.334.934.091			100%	3.668.427.500
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangannya	Kota Singkawang	12 Bulan	3.019.484.091			12 Bulan	3.321.432.500
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	Kota Singkawang	1 Dokumen	300.000.000			1 Dokumen	330.000.000
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Singkawang	1 Dokumen	15.450.000			1 Dokumen	16.995.000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	40.000.000	DAU		100%	44.000.000

2022

5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu yang Diadakan	Kota Singkawang	40 Stel	40.000.000	DAU		40 Stel	44.000.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	1.014.239.740	DAU		100%	1.115.663.714
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Singkawang	100%	9.500.000	DAU		100%	10.450.000
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor Yang di Sediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang di adakan	Kota Singkawang	100%	285.000.000	DAU		100%	313.500.000
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor Yang disediakan	Kota Singkawang	100%	8.500.000	DAU		3 Unit	9.350.000
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	Kota Singkawang	100%	15.000.000	DAU		100%	16.500.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Singkawang	100%	39.739.740	DAU		100%	43.713.714
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Singkawang	3 Surat Kabar	6.500.000	DAU		100%	7.150.000

2022

5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Yang dilaksanakan	Kota Singkawang	100%	650.000.000	DAU		100%	715.000.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Singkawang	100%	3.550.000.000	DAU			
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Kendaraan Dinas Operasional Yang di adakan	Kota Singkawang	1 Unit	550.000.000	DAU			
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Gedung Kantor Bappeda	Kota Singkawang	100%	3.000.000.000	DAU			
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	100%	534.512.760	DAU		100%	587.964.036
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang disediakan	Kota Singkawang	100%	2.000.000	DAU		100%	2.200.000
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Internet dan Listrik yang disediakan	Kota Singkawang	100%	250.000.000	DAU		12 bln	275.000.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah PTT yang menerima gaji	Kota Singkawang	100% 9 Orang	282.512.760	DAU		12 bln	310.764.036
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kota Singkawang	100%	200.660.000	DAU		100%	220.726.000
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Kota Singkawang	1 Unit	35.040.000	DAU	1 Unit	1 Unit	38.544.000

2022

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Kota Singkawang	1 Unit	105.120.000	DAU		1 Unit	115.632.000
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara	Kota Singkawang	100M ²	10.000.000	DAU		100M ²	11.000.000
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang di pelihara	Kota Singkawang	53 Unit	45.000.000	DAU		53 Unit	49.500.000
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan rehabilitasi sarana dan prasarana yang di rehabilitasi	Kota Singkawang	100M ²	5.500.000	DAU		100M ²	6.050.000
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	1.343.000.000	DAU		100%	1.477.300.000

2022

		yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD							
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	Kota Singkawang	100%	558.000.000	DAU		100%	613.800.000
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan Anggaran	Kota Singkawang	4 Dokumen	27.150.000	DAU		4 Dokumen	29.865.000
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Singkawang	10 Kegiatan	44.000.000	DAU		10 Kegiatan	48.400.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Forum OPD	Kota Singkawang	1 Kegiatan	40.200.000	DAU		1 Kegiatan	44.220.000
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD	Kota Singkawang	1 Kegiatan	191.150.000	DAU		1 Kegiatan	210.265.000
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Singkawang	5 Dokumen	39.500.000	DAU		5 Dokumen	43.450.000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kota Singkawang	2 Dokumen	216.000.000	DAU		2 Dokumen	237.600.000

2022

5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	100%	500.000.000	DAU		100%	550.000.000
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang dikumpulkan	Kota Singkawang	1 Dokumen	200.000.000	DAU		1 Dokumen	220.000.000
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Singkawang	1 Kegiatan	150.000.000			1 Kegiatan	165.000.000
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	1 Buku	150.000.000			1 Buku	165.000.000
5.01.02.2.03.01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	100%	285.000.000	DAU		100%	313.500.000
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	8 Kegiatan	50.000.000	DAU		3 Dokumen	55.000.000

2022

5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Kerjasama	Kota Singkawang	1 Dokumen	25.000.000	DAU		3 Dokumen	27.500.000
5.01.02.2.03.03	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	4 Dokumen	210.000.000	DAU		1 Laporan	231.000.000
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD	Kota Singkawang	100%	795.000.000	DAU		100%	874.500.000
		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RPJMD/RKPD							
		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD							
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan OPD Bidang Pemerintahan yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD/RKPD	Kota Singkawang	100%	335.000.000	DAU		100%	368.500.000

2022

5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Singkawang	10 kegiatan	70.000.000	DAU		6 kegiatan	77.000.000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Singkawang	2 Dokumen 10 Kegiatan	40.000.000	DAU		2 Dokumen	44.000.000
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Singkawang	12 Kegiatan	195.000.000	DAU		12 Kegiatan	214.500.000
5.01.03.2.01.05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	Kota Singkawang	2 Dokumen 5 Kegiatan	30.000.000	DAU		2 Dokumen 5 Kegiatan	33.000.000

2022

	Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan OPD Bidang Ekonomi dan SDA yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	Kota Singkawang	100%	170.000.000	DAU		100%	187.000.000
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Singkawang	15 Kegiatan	75.000.000	DAU		15 Kegiatan	82.500.000
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Penyusunan, Jumlah Rapat Asistensi Dokumen	Kota Singkawang	2 Dokumen 12 Kegiatan	40.000.000	DAU		2 Dokumen 12 Kegiatan	44.000.000

2022

		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Singkawang	10 Kegiatan	35.000.000	DAU		10 Kegiatan	38.500.000
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA, Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Singkawang	2 Dokumen 6 Kegiatan	20.000.000	DAU		2 Dokumen 6 Kegiatan	22.000.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	Kota Singkawang	100%	290.000.000	DAU		100%	319.000.000
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kota Singkawang	20 Kegiatan	200.000.000	DAU		20 Kegiatan	220.000.000

2022

	Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur							
5.01.02.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	Kota Singkawang	1 Dokumen 6 Kegiatan	40.000.000	DAU		1 Dokumen 6 Kegiatan	44.000.000
5.01.02.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Singkawang	10 Kegiatan	30.000.000	DAU		10 Kegiatan	33.000.000
5.01.02.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan, Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	Kota Singkawang	8 Kegiatan 1 Dokumen	20.000.000	DAU		8 Kegiatan 1 Dokumen	22.000.000

2022

5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kota Singkawang	100%	793.490.124	DAU		100%	872.839.136
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Adanya Peningkatan Capaian Kinerja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Singkawang	100%	127.000.000	DAU		100%	139.700.000
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Tersediaanya Dokumen/Laporan hasil Kegiatan Yang di Fasilitasi	Kota Singkawang	1 Laporan (12.000.000	DAU		5 Kegiatan	13.200.000
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Tersediaanya Dokumen Data Kelitabangan dan Peraturan	Kota Singkawang	1 Dokumen	115.000.000	DAU		2 Dokumen	126.500.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Adanya Peningkatan Capaian Kinerja pada Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Singkawang	100%	230.000.000	DAU		100%	253.000.000
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Singkawang	1 Dokumen	115.000.000	DAU		1 Dokumen	126.500.000
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersediaanya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Singkawang	1 Dokumen	115.000.000	DAU		1 Dokumen	126.500.000

2022

5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Singkawang	100%	181.490.124	DAU		100%	199.639.136
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Singkawang	1 Dokumen	81.490.124	DAU		5 Kegiatan	89.639.136
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian Penataan Ruang dan Pertanahan	Kota Singkawang	1 Dokumen	100.000.000	DAU		2 Dokumen	110.000.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Komunikasi	Kota Singkawang	100%	255.000.000	DAU		100%	280.500.000
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi daerah yang diteliti dan/atau dikembangkan dan/atau direkayasakan	Kota Singkawang	3 Inovasi	200.000.000	DAU		3 Inovasi	220.000.000
5.05.02.2.02.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan dan/atau didiseminasikan	Kota Singkawang	6 Hasil Kelitbangan	55.000.000	DAU		6 Hasil Kelitbangan	60.500.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 55.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.15.450.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.15.450.000,00
 - **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 25.000.000,00
- 2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.334.934.091,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.019.484.091,00
 - **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 300.000.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**
 - **Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.450.000,00**
- 3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.000.000,00
- 4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.014.239.740,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

- Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.500.000,00
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 285.000.000,00
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.500.000,00
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 75.908.000,00
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 39.739.740,00
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.709.000,00
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.500.000,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 650.000.000,00
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.550.000.000,00,
dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 550.000.000,00
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.000.000.000,00
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 534.512.760,00,
dengan rincian sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 2.000.000,00
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 250.000.000,00
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 282.512.760,00

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 200.660.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 35.040.000,00
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 105.120.000,00
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 45.000.000,00
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.500.000,00
- **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
8. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 558.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 27.150.000,00
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 44.000.000,00
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.200.000,00
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 191.150.000,00
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 39.500.000,00

- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 216.000.000,00
- 9. Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 200.000.000,00
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 150.000.000,00
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 150.000.000,00
- 10. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 285.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 50.000.000,00
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 25.000.000,00
 - Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 210.000.000,00
- **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 11. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 335.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 70.000.000,00
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.000.000,00

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.195.000.000,00
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.30.000.000,00
- 12. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 170.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.75.000.000,00
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.000.000,00
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.35.000.000,00
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.20.000.000,00
- 13. Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 290.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 200.000.000,00
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.000.000,00
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 30.000.000,00

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00
- **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**
- 14. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 127.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 12.000.000,00
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 115.000.000,00
- 15. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 230.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 115.000.000,00
 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 115.000.000,00
- 16. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 181.490.124,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 81.490.124,00
 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.000.000,00
- 17. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 255.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 200.000.000,00
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.55.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelayanan publik.

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Rencana Kerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2022 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Bappeda Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Bappeda harus sama dengan yang tertuang dalam Renstra Bappeda sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Kerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2022 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Singkawang, Juni 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
Kota Singkawang,



J. YUSNITA FITRIADI
Nip. 196305251993031005